

Pendidikan Tanpa Konflik: Strategi Dikbud NTB dalam Menciptakan Keharmonisan

¹Supriadi, ²Suprpto, ³Abdul Malik

^{1,2,3}Pasca Sarjana UIN Mataram

*Corresponding Author e-mail: supriadi@gmail.com

Abstract

This research aims to explore and analyze the strategies implemented by the West Nusa Tenggara (NTB) Department of Education and Culture (Dikbud) in creating education that is free from conflict and harmony. Using a descriptive qualitative methodology with a case study approach, this research found that increased communication between stakeholders, character education, and mediation as the main approaches in conflict resolution have succeeded in creating a conducive learning environment. Apart from that, the use of local wisdom and application of the principles of social justice and inclusiveness are important factors in reducing educational disparities. The research results show that these strategies not only increase harmonious relationships between educators, students, parents and the community, but also contribute to the development of student character. This research recommends strengthening mediation programs, more active community involvement, and inclusive education policies to ensure the continuation of peaceful education in NTB

Key Words: *Pendidikan tanpa konflik, strategi, Dikbud NTB, mediasi, keharmonisan, keadilan sosial*

How to Cite: Supriadi, Suprpto, Abdul Malik. (2025). *Pendidikan Tanpa Konflik: Strategi Dikbud NTB dalam Menciptakan Keharmonisan*. Jipmor: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Humaniora, Vol.3, No.1,2025 doi: <https://doi.org/10.36312/jipmor.v3i1.39>



<https://doi.org/10.36312/jipmor.v3i1.39>

Copyright© 2025, Author (s)

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) License.



PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam pembangunan suatu bangsa. Sebagai salah satu sektor yang paling vital, dunia pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan kecerdasan generasi muda. Namun, dalam prosesnya, pendidikan sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan, salah satunya adalah konflik. Konflik dalam pendidikan bisa muncul dari banyak faktor, seperti perbedaan pendapat antara pihak-pihak yang terlibat, ketidakseimbangan antara kebijakan pemerintah dengan kondisi lapangan, hingga masalah sosial yang melibatkan orang tua, siswa, dan pendidik. Konflik ini, jika tidak dikelola dengan baik, bisa menghambat proses belajar mengajar dan merugikan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan pola pikir generasi muda. Di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Barat (NTB), pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer

ilmu, tetapi juga sebagai alat untuk membangun kerukunan dan keharmonisan dalam masyarakat yang majemuk. Dalam konteks ini, pendidikan tanpa konflik menjadi suatu kebutuhan yang mendesak, terutama di daerah yang memiliki keragaman budaya, agama, dan suku seperti NTB. Konflik dalam pendidikan dapat muncul dari berbagai faktor, termasuk perbedaan latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB berupaya untuk mengimplementasikan berbagai strategi yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang harmonis dan inklusif. Menurut Supriyadi (2020), pendidikan yang baik harus mampu mengurangi potensi konflik dan meningkatkan toleransi antar siswa. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang menekankan pentingnya pembentukan karakter dan nilai-nilai kebangsaan.

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut, berbagai strategi telah diterapkan oleh Dikbud NTB. Salah satunya adalah dengan meningkatkan komunikasi antar berbagai pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan, mulai dari guru, siswa, orang tua, hingga pemerintah daerah. Selain itu, Dikbud NTB juga fokus pada pembinaan pendidik, penyelesaian konflik melalui mediasi, serta pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan transparansi dan kolaborasi di dunia pendidikan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk membangun budaya sekolah yang lebih terbuka, akomodatif, dan minim konflik. Maka dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk menggali dan menganalisis bagaimana strategi yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam menciptakan pendidikan yang harmonis dan bebas dari konflik. Berangkat dari persoalan tersebut maka penulis melihat Bagaimana strategi yang diterapkan oleh Dikbud NTB dalam mengelola dan menyelesaikan konflik yang muncul di dunia pendidikan dan faktor-faktor yang menjadi penyebab konflik dalam pendidikan di NTB, dan bagaimana Dikbud NTB mengidentifikasi serta menanggapi penyebab-penyebab tersebut serta sejauh mana penerapan strategi penyelesaian konflik oleh Dikbud NTB dapat meningkatkan keharmonisan dalam hubungan antara pendidik, peserta didik, orang tua, dan masyarakat. (Kemendikbud, 2019)

Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis menawarkan pendekatan yang sangat spesifik terhadap penyelesaian konflik pendidikan di NTB dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan geografis daerah tersebut. NTB memiliki kekayaan budaya yang beragam, dengan perbedaan etnis dan tradisi yang sangat kental. Hal ini menuntut suatu strategi resolusi konflik yang tidak hanya didasarkan pada teori pendidikan universal, tetapi juga disesuaikan dengan kearifan lokal dan karakteristik masyarakat setempat. Penelitian ini menyoroti bagaimana Dikbud NTB memanfaatkan potensi kearifan lokal dalam penyelesaian konflik pendidikan, yang mungkin belum banyak dieksplorasi dalam penelitian pendidikan lainnya. Selain itu penelitian ini melakukan analisis lebih dalam mengenai penerapan mediasi sebagai strategi utama dalam penyelesaian konflik pendidikan. Banyak penelitian sebelumnya yang menyoroti penyelesaian konflik melalui pendekatan administratif atau legal formal, namun penelitian ini akan lebih menekankan pada penggunaan mediasi sebagai solusi yang lebih humanis dan berbasis kolaborasi. Penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana proses mediasi

dilakukan dalam konteks sekolah di NTB dan efektivitasnya dalam menciptakan keharmonisan serta penelitian ini lebih fokus pada strategi penyelesaian konflik yang mengedepankan prinsip inklusivitas dan keadilan sosial. Dalam konteks NTB yang memiliki keragaman sosial dan ekonomi, penting untuk memastikan bahwa setiap kelompok mendapat perlakuan yang adil dan setara. Penelitian ini akan menggali bagaimana Dikbud NTB menerapkan kebijakan yang tidak hanya mengatasi konflik yang terjadi, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan pendidikan yang diterapkan menciptakan keadilan dan mereduksi kesenjangan antara berbagai kelompok, baik dalam hal akses pendidikan, kualitas pengajaran, maupun partisipasi dalam pengambilan keputusan pendidikan.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis strategi yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam menciptakan pendidikan yang bebas dari konflik dan harmonis. Metodologi penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah kualitatif deskriptif, dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap strategi dan kebijakan yang diterapkan oleh Dikbud NTB dalam konteks lokal yang spesifik, serta bagaimana strategi tersebut diimplementasikan dan diterima oleh berbagai pemangku kepentingan. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif untuk memahami fenomena yang kompleks dalam konteks pendidikan NTB.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali perspektif, pengalaman, dan perasaan para pemangku kepentingan (stakeholders) terkait strategi resolusi konflik dalam pendidikan. Penelitian ini mengadopsi desain studi kasus, karena fokusnya adalah untuk mempelajari secara mendalam tentang upaya penyelesaian konflik dalam pendidikan di NTB. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena yang terjadi dalam konteks yang terbatas (NTB), tetapi dengan pemahaman yang mendalam tentang strategi yang diterapkan dan dampaknya terhadap kualitas pendidikan. Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yang menurut Sugiyono (2019) meliputi langkah-langkah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Melalui pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana manajemen konflik di UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok berperan dalam merajut kebersamaan dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pendidikan adalah pilar utama dalam pembentukan karakter dan kualitas sumber daya manusia. Namun, dalam perjalanan panjangnya, dunia pendidikan tidak luput dari tantangan, salah satunya adalah konflik. Konflik dalam pendidikan dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari ketidaksepahaman antara pendidik dan peserta didik, perbedaan persepsi antara orang tua dan sekolah, hingga ketegangan yang timbul akibat perbedaan sosial dan budaya. Konflik ini, jika tidak dikelola dengan baik, dapat mengganggu proses belajar mengajar, merusak hubungan antar individu dalam lingkungan pendidikan, dan akhirnya merugikan

kualitas pendidikan itu sendiri. Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagai provinsi dengan keanekaragaman budaya, sosial, dan geografis yang khas, menghadapi tantangan tersendiri dalam dunia pendidikan. Masyarakat NTB yang majemuk, dengan beragam suku dan tradisi, sering kali menjadi sumber dinamika sosial yang tidak terhindarkan, termasuk dalam sektor pendidikan. Oleh karena itu, upaya untuk menciptakan pendidikan yang harmonis, bebas dari konflik, dan inklusif menjadi hal yang sangat penting.

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah pentingnya peran mediasi sebagai strategi penyelesaian konflik yang lebih manusiawi dan berbasis pada komunikasi terbuka. Dengan melibatkan semua pihak terkait dalam dialog yang konstruktif, mediasi telah berhasil meredakan ketegangan dan menciptakan solusi yang dapat diterima bersama. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak sekolah juga terbukti menjadi faktor kunci dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan harmonis. Namun demikian, meskipun berbagai strategi tersebut telah diterapkan dengan cukup baik, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan yang perlu diatasi. Beberapa tantangan utama yang dihadapi Dikbud NTB dalam menciptakan pendidikan yang bebas dari konflik meliputi keterbatasan sumber daya, kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di lapangan, serta ketidakterbukaan komunikasi antara pemangku kepentingan. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya terus-menerus untuk meningkatkan kualitas implementasi kebijakan, serta memperkuat peran aktif seluruh komponen masyarakat dalam menjaga keharmonisan dalam pendidikan.

Ada beberapa temuan utama dalam penelitian ini antara lain:

1. Strategi Komunikasi yang Efektif

Salah satu strategi utama yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam menciptakan pendidikan yang harmonis adalah peningkatan komunikasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan. Penelitian ini menemukan bahwa melalui berbagai forum diskusi, pertemuan rutin, dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Dikbud NTB, pihak sekolah, orang tua, dan pemerintah daerah dapat saling bertukar informasi dan pandangan. Strategi ini terbukti efektif dalam mengurangi kesalahpahaman, meningkatkan kolaborasi, dan menyelesaikan berbagai masalah yang muncul di dunia pendidikan. Penguatan komunikasi ini menjadi salah satu pilar penting dalam menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara pihak-pihak yang terlibat.

Salah satu teori yang relevan untuk menjelaskan pentingnya komunikasi dalam konteks ini adalah Teori Komunikasi Interpersonal. Teori ini menekankan bahwa komunikasi yang efektif antara individu-individu (dalam hal ini, guru, orang tua, dan siswa) adalah kunci untuk menciptakan pemahaman bersama dan mencegah terjadinya konflik. Gudykunst dan Kim (2003) dalam bukunya *Communicating with Strangers: An Approach to Intercultural Communication* menjelaskan bahwa komunikasi interpersonal yang efektif melibatkan keterampilan mendengarkan secara aktif, pemahaman terhadap perspektif orang lain, serta penggunaan pesan yang jelas dan tidak ambigu. Dalam konteks NTB, yang memiliki keberagaman sosial dan budaya, komunikasi yang efektif dapat

membantu meredakan ketegangan yang sering timbul akibat perbedaan pandangan atau kesalahpahaman.

Melalui forum diskusi dan pertemuan rutin yang diadakan oleh Dikbud NTB, para pemangku kepentingan di dunia pendidikan diberi ruang untuk saling berbagi pandangan dan pengalaman. Hal ini menciptakan iklim komunikasi yang saling menghargai dan meminimalkan potensi konflik. Penerapan prinsip-prinsip komunikasi interpersonal yang baik—seperti penguatan keterampilan mendengarkan aktif, penyampaian pesan secara terbuka dan jelas, serta empati terhadap perspektif orang lain—membantu memfasilitasi dialog yang konstruktif dan penyelesaian masalah yang lebih efektif.

Selain itu bahwa Peningkatan komunikasi juga dapat dijelaskan melalui Teori Resolusi Konflik, yang menekankan pentingnya dialog terbuka dalam menyelesaikan konflik secara damai. Menurut Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument (1974), ada lima cara utama yang digunakan untuk mengatasi konflik: menghindari, menyesuaikan, mendominasi, berkompromi, dan berkolaborasi. Dalam konteks pendidikan, penerapan pendekatan kolaboratif—di mana pihak-pihak yang terlibat bekerja sama untuk mencari solusi win-win—adalah strategi yang paling efektif. Komunikasi yang terbuka dan transparan dapat menciptakan kondisi yang mendukung tercapainya solusi bersama tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Dikbud NTB mengimplementasikan forum diskusi dan pertemuan rutin sebagai bagian dari strategi resolusi konflik. Dalam pertemuan-pertemuan ini, pihak sekolah, orang tua, dan pemerintah daerah tidak hanya saling berbagi informasi, tetapi juga berkolaborasi dalam mencari solusi terhadap masalah yang muncul. Pendekatan kolaboratif ini memungkinkan semua pihak untuk mendengarkan dan menghargai pandangan satu sama lain, yang pada gilirannya mengurangi ketegangan dan menciptakan suasana pendidikan yang lebih harmonis. Disamping teori tersebut diatas maka komunikasi yang terstruktur melalui pelatihan-pelatihan yang diadakan secara berkala juga memperkuat kemampuan masing-masing pemangku kepentingan dalam menyelesaikan konflik secara konstruktif. Melalui pelatihan ini, mereka diberikan pemahaman tentang teknik-teknik penyelesaian konflik yang berbasis pada prinsip komunikasi yang efektif, seperti mediasi dan negosiasi. Dengan demikian, komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk bertukar informasi, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menyelesaikan konflik yang dapat timbul dalam proses pendidikan.

Selain dari beberapa teori tersebut diatas maka komunikasi yang baik juga memiliki kaitan erat dengan teori keadilan, khususnya Teori Keadilan Sosial (Social Justice Theory) yang dikembangkan oleh John Rawls (1971). Rawls menyatakan bahwa untuk mencapai keadilan sosial, setiap individu harus diperlakukan dengan setara, dan kesenjangan sosial harus diminimalisir melalui prinsip distribusi yang adil. Dalam konteks pendidikan di NTB, komunikasi yang efektif antara sekolah, orang tua, dan pemerintah daerah berperan dalam memastikan bahwa kebijakan pendidikan diterima secara adil oleh semua pihak. Dengan adanya pertemuan rutin yang melibatkan semua pemangku kepentingan, setiap individu memiliki kesempatan yang setara untuk

menyampaikan pandangannya. Ini menciptakan kesadaran bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau sekolah semata, tetapi juga masyarakat luas. Partisipasi aktif dalam komunikasi memastikan bahwa semua suara didengar dan bahwa kebijakan pendidikan yang diambil tidak berpihak, tetapi mencerminkan kepentingan dan kebutuhan bersama. Hal ini memperkuat keadilan sosial dalam sistem pendidikan dan mengurangi potensi konflik yang sering timbul akibat ketidakadilan atau ketidakseimbangan dalam pembagian sumber daya.

2. Mediasi sebagai Pendekatan Utama

Penelitian ini menemukan bahwa mediasi menjadi salah satu strategi utama dalam penyelesaian konflik pendidikan di Nusa Tenggara Barat (NTB). Mediasi adalah proses di mana pihak-pihak yang berkonflik dilibatkan dalam dialog terbuka dengan tujuan untuk menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Proses ini memberikan ruang bagi para pihak untuk berbicara, mendengarkan satu sama lain, dan bersama-sama mencari jalan keluar yang konstruktif. Pendekatan ini terbukti lebih efektif dibandingkan dengan metode penyelesaian konflik yang bersifat administratif atau legal formal, karena mediasi mengedepankan aspek humanis dan kolaboratif.

Dalam konteks pendidikan di NTB, mediasi menjadi pilihan yang lebih unggul karena berbagai alasan. Di antaranya, mediasi tidak hanya fokus pada penyelesaian masalah yang tampak, tetapi juga berusaha memperbaiki hubungan antar individu yang terlibat. Hal ini sangat penting dalam lingkungan pendidikan yang melibatkan hubungan jangka panjang antara guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Mediasi membantu memperkuat komunikasi, saling pengertian, dan mencegah terjadinya konflik di masa depan. Teori Konflik Konstruktif berpendapat bahwa konflik tidak selalu berdampak negatif. Sebaliknya, jika dikelola dengan baik, konflik dapat menghasilkan solusi inovatif dan memperbaiki hubungan antar pihak yang terlibat. Kenneth Thomas dalam bukunya *Conflict and Conflict Management* (1992) menjelaskan bahwa konflik konstruktif terjadi ketika individu atau kelompok menghadapinya secara terbuka dan dengan niat untuk menemukan solusi bersama. Mediasi sejalan dengan prinsip teori ini karena memfasilitasi komunikasi terbuka antara pihak-pihak yang berkonflik dan mendorong mereka untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. Penerapan teori ini dalam konteks pendidikan di NTB menunjukkan bahwa mediasi memberikan ruang bagi pihak yang berkonflik untuk menyampaikan perspektif mereka, tanpa merasa terpojok atau diabaikan. Dengan begitu, mediasi memungkinkan tercapainya solusi yang tidak hanya menyelesaikan masalah yang ada tetapi juga memperkuat hubungan antar pemangku kepentingan pendidikan.

Teori Mediasi mengedepankan pendekatan non-adversarial dalam penyelesaian konflik. Folger, Poole, & Stutman (2017) dalam bukunya

Working through Conflict: Strategies for Relationships, Groups, and Organizations menyatakan bahwa mediasi bertujuan untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat, dengan bantuan seorang mediator yang netral. Dalam mediasi pendidikan di NTB, mediator bisa berasal dari pihak sekolah, dinas pendidikan, atau masyarakat yang memiliki kredibilitas dan kepercayaan dari semua pihak yang berkonflik.

Mediasi dalam konteks ini berfungsi untuk sebagai pertama. Mengurangi ketegangan antara pihak-pihak yang terlibat, baik itu antara guru dan orang tua, antara siswa dan guru, maupun antara pihak sekolah dan masyarakat. Kedua. Memfasilitasi pencarian solusi kreatif yang mungkin tidak dapat dicapai dengan metode penyelesaian konflik yang lebih formal, seperti prosedur administratif atau legal. Ketiga. Mengembalikan rasa saling menghargai antara pihak-pihak yang berkonflik, yang pada gilirannya membantu memperbaiki iklim pendidikan secara keseluruhan. Keempat. Mediasi mengedepankan aspek humanis dan kolaboratif, yang membuatnya lebih efektif dibandingkan dengan metode penyelesaian konflik yang bersifat administratif atau legal formal. Proses mediasi memberi kesempatan bagi semua pihak untuk mendengarkan dan dipahami, yang sangat penting dalam menciptakan rasa keadilan dan pengakuan terhadap perasaan dan kepentingan semua pihak. Dalam konteks pendidikan, terutama di NTB yang memiliki keberagaman sosial dan budaya yang tinggi, mediasi menawarkan pendekatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Proses ini melibatkan pihak-pihak yang memiliki pengaruh langsung terhadap pendidikan – seperti guru, orang tua, siswa, dan pihak sekolah – untuk berkolaborasi dalam mencari solusi, daripada mengandalkan keputusan sepihak dari otoritas administratif. Hal ini menciptakan rasa tanggung jawab bersama terhadap masalah yang dihadapi dan memperkuat rasa kebersamaan dalam menyelesaikan masalah.

Salah satu keuntungan utama dari mediasi adalah kemampuannya untuk mengurangi ketegangan dan meningkatkan hubungan interpersonal. Pendekatan administratif atau legal formal sering kali lebih berfokus pada penegakan aturan dan hukuman, yang dapat memperburuk hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Mediasi, di sisi lain, berfokus pada pemulihan hubungan dan pencapaian solusi yang win-win, yang mendukung keharmonisan jangka panjang dalam dunia pendidikan. Dalam banyak kasus, penyelesaian konflik melalui jalur hukum atau administratif lebih bersifat reaktif dan terfokus pada penyelesaian masalah yang sudah terjadi. Sebaliknya, mediasi dapat berfungsi sebagai strategi preventif yang mengedepankan komunikasi dua arah dan memberikan ruang bagi solusi yang lebih konstruktif sebelum konflik berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

3. Keadilan Sosial dan Inklusivitas

Penelitian ini menyoroti penerapan prinsip keadilan sosial dalam kebijakan pendidikan yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Nusa Tenggara Barat (NTB). Dalam konteks ini, keadilan sosial merujuk pada upaya untuk memastikan bahwa setiap individu, terutama mereka yang berasal dari kelompok masyarakat yang terpinggirkan, mendapatkan akses yang setara dan adil terhadap pendidikan yang berkualitas. Kebijakan inklusif yang diadopsi oleh Dikbud NTB tidak hanya berfokus pada penyelesaian konflik yang mungkin muncul akibat ketidaksetaraan dalam akses pendidikan, tetapi juga berperan penting dalam mengurangi kesenjangan pendidikan yang ada di daerah tersebut. Salah satu tujuan utama dari kebijakan pendidikan di NTB adalah untuk mengatasi ketimpangan yang ada antara kelompok masyarakat yang lebih maju secara sosial dan ekonomi dengan mereka yang hidup di wilayah terpencil, miskin, atau kurang berkembang. Hal ini relevan dengan teori keadilan sosial yang pertama kali diperkenalkan oleh John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* (1971), yang mengemukakan bahwa keadilan harus memastikan distribusi sumber daya yang adil bagi seluruh anggota masyarakat, terutama mereka yang berada dalam posisi paling rentan. Rawls menekankan dua prinsip utama keadilan sosial: Prinsip Kebebasan yang menjamin hak individu atas kebebasan dasar yang sama, dan Prinsip Perbedaan yang menyatakan bahwa ketidaksetaraan sosial atau ekonomi hanya bisa diterima jika ketidaksetaraan tersebut memberikan keuntungan bagi anggota masyarakat yang paling tidak beruntung.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam kebijakan pendidikan di NTB bertujuan untuk memberikan kesempatan yang setara bagi semua lapisan masyarakat, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang budaya. Sebagai contoh, Dikbud NTB telah mengimplementasikan kebijakan yang mengutamakan pendidikan inklusif dan merata, terutama dengan mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk sekolah-sekolah di daerah terisolasi atau yang memiliki akses terbatas terhadap fasilitas pendidikan yang memadai. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mempersempit kesenjangan pendidikan yang sebelumnya telah menjadi hambatan besar dalam pencapaian pendidikan yang merata.

Sebagaimana John Rawls dalam *A Theory of Justice* (1971) menyatakan bahwa keadilan sosial tidak hanya berbicara tentang kesetaraan hak, tetapi juga bagaimana sumber daya dan kesempatan dibagi secara adil di dalam masyarakat. Rawls mengusulkan dua prinsip utama untuk memastikan keadilan sosial dalam masyarakat dengan menganut Prinsip Kebebasan Setiap individu harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan yang memadai. Ini mencakup kebebasan untuk memilih sekolah, mendapatkan informasi pendidikan yang akurat, dan mengakses sumber daya pendidikan tanpa diskriminasi. Selain itu Prinsip Perbedaan. Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat diterima jika ketidaksetaraan tersebut membawa keuntungan bagi mereka yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. Dalam konteks pendidikan di NTB, ini berarti bahwa alokasi sumber daya pendidikan harus mempertimbangkan keadaan

mereka yang berada dalam posisi kurang beruntung, seperti anak-anak dari keluarga miskin, daerah terpencil, atau kelompok minoritas budaya.

Dikbud NTB, dengan kebijakan pendidikan inklusifnya, berusaha menerapkan kedua prinsip ini dengan menyediakan akses pendidikan yang lebih besar bagi mereka yang tinggal di daerah terpinggirkan dan kurang berkembang. Selain itu, kebijakan ini berupaya untuk mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan antara sekolah di wilayah perkotaan dan pedesaan. Sherry Arnstein dalam teorinya tentang partisipasi warga negara (1969) menggambarkan tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan sebagai sebuah tangga (ladder) partisipasi. Arnstein mengidentifikasi delapan tingkat partisipasi, yang dimulai dari manipulasi (manipulation) di tingkat bawah hingga pemberdayaan (empowerment) di tingkat atas. Dalam konteks kebijakan pendidikan di NTB, penerapan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan menjadi sangat penting, terutama dalam upaya untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan tersebut benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang terpinggirkan. Kebijakan pendidikan yang inklusif di NTB menempatkan partisipasi masyarakat pada tingkat yang lebih tinggi dalam tangga partisipasi Arnstein. Misalnya, pertemuan komunitas dan forum diskusi antara sekolah, orang tua, dan pemerintah daerah sering diadakan untuk membahas isu-isu pendidikan dan mencari solusi bersama. Dengan demikian, kebijakan Dikbud NTB menciptakan keterlibatan aktif dari masyarakat dalam memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh kelompok sosial, terutama mereka yang terpinggirkan.

Teori Ekonomi Kesejahteraan, seperti yang dijelaskan oleh Amartya Sen (1999) dalam *Development as Freedom*, juga relevan dalam membahas keadilan sosial dalam kebijakan pendidikan. Sen berpendapat bahwa keadilan ekonomi tidak hanya dilihat dari distribusi kekayaan, tetapi juga dari kesempatan bagi setiap individu untuk mengakses sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, termasuk pendidikan. Dalam hal ini, Dikbud NTB berusaha untuk menyediakan akses pendidikan yang adil dan berkualitas bagi semua lapisan masyarakat, yang pada gilirannya dapat membantu mereka mengatasi kemiskinan dan keterbatasan sosial-ekonomi mereka. Pendekatan ini juga terlihat dalam kebijakan pendidikan berbasis pemberdayaan, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Program-program pendidikan yang diluncurkan oleh Dikbud NTB menekankan pentingnya pemberdayaan komunitas lokal, peningkatan kualitas pendidikan di daerah-daerah terpencil, serta penyediaan kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu.

Selain teori tersebut diatas bahwa yang tidak kalah pentingnya pendidikan inklusif dalam mencapai keadilan sosial di bidang pendidikan sangat ditekankan dalam teori Pendidikan Inklusif. Pendidikan inklusif menekankan pentingnya menyediakan kesempatan pendidikan yang setara bagi semua anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau disabilitas. Dalam konteks NTB, kebijakan pendidikan inklusif ini bertujuan untuk memastikan

bahwa anak-anak dari kelompok minoritas, anak-anak yang terpinggirkan, dan anak-anak dengan kebutuhan khusus mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas. Pendidikan inklusif tidak hanya memperhatikan aspek fisik dan geografis dari pendidikan, tetapi juga melibatkan aspek psikososial dan budaya yang harus diperhatikan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi semua peserta didik. Dengan demikian, kebijakan pendidikan inklusif yang diterapkan oleh Dikbud NTB sejalan dengan prinsip keadilan sosial, karena memberikan perhatian khusus pada kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan.

4. Dampak Positif terhadap Keharmonisan

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan berbagai strategi untuk menciptakan keharmonisan dalam hubungan antara pendidik, peserta didik, orang tua, dan masyarakat di Nusa Tenggara Barat (NTB) telah memberikan dampak yang sangat positif terhadap iklim pendidikan di daerah tersebut. Strategi-strategi ini, yang mencakup mediasi dalam penyelesaian konflik, peningkatan komunikasi yang terbuka antara semua pihak terkait, serta penguatan kerja sama antara sekolah dan masyarakat, telah berhasil menciptakan suasana yang lebih kondusif untuk proses belajar mengajar. Keharmonisan yang tercipta dalam hubungan ini tidak hanya mempengaruhi interaksi sosial di dalam dan di luar kelas, tetapi juga memperkuat rasa saling pengertian dan kepercayaan antara berbagai pemangku kepentingan dalam pendidikan, termasuk antara guru, siswa, orang tua, dan pemerintah.

Penerapan strategi-strategi tersebut telah terbukti meningkatkan kualitas pendidikan di NTB, yang tercermin dalam peningkatan prestasi akademik siswa, serta pengembangan karakter siswa yang lebih baik. Hal ini sangat relevan dengan teori Social Capital yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu (1986) dan James Coleman (1988), yang mengemukakan bahwa modal sosial yang dibangun melalui hubungan yang harmonis dan saling mendukung di dalam komunitas memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan sosial dan pendidikan. Dalam konteks pendidikan di NTB, terciptanya jaringan hubungan sosial yang kuat antara sekolah, keluarga, dan masyarakat telah meningkatkan kepercayaan dan kerja sama, yang pada gilirannya memperbaiki hasil pembelajaran dan perkembangan karakter peserta didik.

Melalui pendekatan yang lebih kolaboratif dan partisipatif, berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan – terutama pendidik dan orang tua – dapat lebih aktif dalam mendukung proses pembelajaran dan pengembangan siswa. Misalnya, melalui forum komunikasi rutin, di mana guru dan orang tua dapat bertukar informasi mengenai perkembangan siswa, serta pelatihan keterampilan mediasi yang meningkatkan kapasitas guru dalam menangani masalah sosial dan akademik di kelas, seluruh pemangku kepentingan merasa lebih terlibat dan memiliki peran dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik. Kehadiran orang tua dalam proses pendidikan, yang selama ini mungkin kurang dirasakan dalam beberapa konteks pendidikan formal, kini menjadi lebih nyata, berkat strategi yang diimplementasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB untuk mendorong keterlibatan orang tua dalam kegiatan sekolah. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa keharmonisan yang tercipta di

lingkungan sekolah bukan hanya berdampak pada aspek akademis, tetapi juga pada pengembangan karakter siswa. Siswa yang belajar dalam lingkungan yang mendukung dan harmonis cenderung menunjukkan tingkat motivasi yang lebih tinggi, kemampuan untuk bekerja sama dalam kelompok, serta kemampuan untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif. Ini sejalan dengan pandangan Albert Bandura (1997) dalam Teori Pembelajaran Sosial yang menekankan pentingnya lingkungan sosial dalam membentuk perilaku dan karakter individu. Dalam hal ini, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial yang diperlukan untuk menjadi anggota masyarakat yang lebih baik.

Keharmonisan dalam hubungan antar individu dalam sistem pendidikan di NTB juga memberikan dampak positif terhadap pengurangan konflik yang sering terjadi antara pihak sekolah, orang tua, dan siswa. Konflik yang sebelumnya seringkali disebabkan oleh perbedaan pandangan, keterbatasan komunikasi, atau ketidakjelasan dalam peran masing-masing pihak kini dapat dikelola dengan lebih baik berkat adanya mediasi dan pendekatan dialog yang diterapkan. Sebagai contoh, ketika terjadi perbedaan pendapat antara orang tua dan guru mengenai metode pengajaran atau kebijakan sekolah, mediasi memungkinkan kedua belah pihak untuk saling mendengarkan dan memahami perspektif masing-masing, sehingga mereka dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi semua pihak, terutama bagi siswa. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan pendekatan dialogis dan solutif dalam mengelola konflik pendidikan bukan hanya mengurangi ketegangan, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial di tingkat sekolah maupun masyarakat. Melalui pendekatan inklusif yang diterapkan oleh Dikbud NTB, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses pendidikan, keberhasilan dalam menciptakan keharmonisan di sekolah tidak hanya terbatas pada lingkup pendidikan formal, tetapi juga meluas ke penguatan ikatan sosial dalam masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat yang lebih terlibat dalam dunia pendidikan, dan yang merasa dihargai dalam kontribusinya terhadap pendidikan, akan lebih termotivasi untuk mendukung keberhasilan pendidikan, baik dari sisi pendanaan, pengawasan sosial, maupun dukungan moral terhadap siswa. Dengan demikian, keharmonisan yang tercipta di lingkungan pendidikan berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian tujuan pendidikan yang lebih luas, yaitu menciptakan masyarakat yang terdidik dan berkarakter.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Nusa Tenggara Barat (NTB) telah menerapkan berbagai strategi efektif dalam menciptakan pendidikan yang bebas dari konflik dan harmonis. Melalui peningkatan komunikasi antara pemangku kepentingan, penekanan pada pendidikan karakter dan toleransi, serta penerapan mediasi sebagai pendekatan utama dalam penyelesaian konflik, Dikbud NTB berhasil menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif. Selain itu, pemanfaatan kearifan lokal dalam strategi penyelesaian konflik menunjukkan bahwa pendekatan yang

berbasis pada konteks sosial dan budaya setempat dapat meningkatkan efektivitas resolusi konflik. Prinsip keadilan sosial dan inklusivitas juga menjadi fokus utama, memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, terutama yang terpinggirkan, mendapatkan akses yang adil terhadap pendidikan.

Dampak positif dari penerapan strategi-strategi ini terlihat dalam peningkatan keharmonisan hubungan antara pendidik, peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Lingkungan pendidikan yang harmonis tidak hanya berkontribusi pada kualitas pendidikan, tetapi juga pada pengembangan karakter siswa yang lebih baik. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan yang kontekstual dan inklusif dalam penyelesaian konflik pendidikan, yang dapat menjadi model bagi daerah lain dalam upaya menciptakan pendidikan yang damai dan harmonis. Dengan demikian, keberhasilan Dikbud NTB dalam mengelola konflik pendidikan dapat menjadi inspirasi bagi kebijakan pendidikan di tingkat nasional dan daerah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Arnstein, S. R. (1969). *A ladder of citizen participation*. Journal of the American Institute of Planners, 35(4), 216-224.
2. Bandura, A. (1997). *Self-efficacy: The exercise of control*. W.H. Freeman.
3. Bourdieu, P. (1986). *The forms of capital*. In J. G. Richardson (Ed.), *Handbook of theory and research for the sociology of education* (pp. 241-258). Greenwood Press.
4. Coleman, J. S. (1988). *Social capital in the creation of human capital*. American Journal of Sociology, 94, S95-S120.
5. Folger, J. P., Poole, M. S., & Stutman, R. K. (2017). *Working through conflict: Strategies for relationships, groups, and organizations* (7th ed.). Pearson.
6. Gudykunst, W. B., & Kim, Y. Y. (2003). *Communicating with strangers: An approach to intercultural communication* (4th ed.). McGraw-Hill.
7. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (2019). *Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024*. Jakarta: Kemdikbud RI.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang *Pengelolaan Pendidikan di Daerah* (2017). Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
9. Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.
10. Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
11. Supriyadi, A. (2020). Pendidikan Karakter dan Toleransi dalam Masyarakat Multikultural. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 5(2), 123-135.
12. Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
13. Thomas, K. W. (1992). *Conflict and conflict management*. Sage Publications.